

.....

**OPTIMALISASI SINERGITAS BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS PADA
SAMBANG DESA GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
RANGKA MEMPERKOKOH PERTAHANAN NEGARA**

Oleh

Yulius Audie Sonny Latuheru¹⁾, Rizerius Eko Hadisancoko²⁾, Lukman Yudho Prakoso³⁾

^{1,2,3}**Military Strategy and Campaign Study Program, Faculty of Defense Strategy
Defense University of Republic Indonesia**

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat

Email: [1kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

Abstrak

Babinsa dan Bhabinkamtibas memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkokoh pertahanan Negara. Salah satu kegiatan yang berpotensi untuk menjadi cara meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kegiatan sambang desa yang dilakukan secara berkala, yang merupakan tugas dan fungsi Babinsa dan Bhabinkamtibas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam memperkokoh pertahanan Negara dan menganalisis sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibas pada sambang desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling. Hasil menunjukkan: 1) Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan belum efektifnya sistem informasi manajemen yang diterapkan pada Babinsa dan Bhabinkamtibas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara; 2) sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibas belum optimal karena kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibas yang belum optimal, sistem dan metode (piranti lunak) yang belum optimal, serta pembinaan kewilayahan pada bidang geografi, demografi dan kondisi sosial yang juga belum optimal. Solusi dari penelitian ini yaitu: 1) mengembangkan dan memperkuat sistem informasi manajemen; 2) meningkatkan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibas, 3) restrukturisasi SOP; 4) mengembangkan pemetaan wilayah.

Kata Kunci: Babinsa, Bhabinkamtibas, Pertahanan Negara, Sambang Desa

PENDAHULUAN

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Pasal 1 ayat (2) UU No 3/2002) [1]. Ancaman adalah setiap upaya dan aktifitas yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik

dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Ancaman dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis, menurut kemungkinan terjadinya, ancaman di klasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu ancaman nyata (aktual) dan tidak nyata (potensial). Bentuk ancaman nyata yaitu: Separatisme, Terorisme, Radikalisme, Konflik Komunal, Pencurian SKA, Narkoba, Bencana Alam.

Dalam mewujudkan sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibas pada sambang desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pembinaan rasa kebangsaan yang dapat diimplementasikan melalui sumbangan pemikiran, tenaga maupun keahlian dalam

rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Dengan adanya pembinaan tersebut akan meningkatkan koordinasi, terbangunnya komunikasi sehingga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan sendirinya yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat meningkat dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Dihadapkan pada kondisi saat ini, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dalam menghadapi berbagai ancaman yang bersifat multidimensional. Hal tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang ditujukan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara [4]. Dengan mengoptimalkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa sebagai salah satu bagian dari *stakeholders* di kewilayahan yang memiliki peranan sangat strategis guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Dengan demikian, sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa menentukan keberhasilan guna meningkatkan partisipasi masyarakat, hal tersebut perlu dilakukan dalam membangun keterpaduan, terkoordinasi dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian dekriptif menurut Nawawi dan Martini merupakan metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Pada penelitian ini, alat peneliti utama (*key instrument*) adalah peneliti itu sendiri yang secara langsung melakukan pengumpulan data secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian ini [5]

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "Strategos", ketika muncul digunakan selama abad ke-18 (Gartner, Scott Sigmund) dilihat dalam arti sempit sebagai "The Arts of General (seni/ ketrampilannya para Jenderal) [6]" (Maurice Matloff) atau 'seni pengaturan' pasukan [7](Anthony Wilden) [8]. B. H. Liddell Hart's mendefinisikan bahwa strategi adalah seni/keterampilan mendistribusikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan saranaprasarana (*means*) yang digunakan [9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan SDM Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa

Kemampuan SDM Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa tidak terlepas dari proses perencanaan (*planning*) yang dijadikan sebagai dasar pemikiran guna meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Dalam hal ini, manusia memiliki peranan penting dalam sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara dengan gambaran kondisi saat ini antara lain :

a. Pendidikan dan pelatihan bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari kondisi dalam mempersiapkan SDM TNI-Polri agar lebih bersinergi dengan cara-cara baru, memiliki kecakapan tinggi, serta memiliki kualitas kerja yang handal dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Malayu S.P Hasibuan, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia berpendapat bahwa "pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral pegawai tenaga kerja. Lebih lanjut, tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan cenderung bekerja secara terampil jika dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan. [10]

Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtinmas pada sambang desa, pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan serangkaian kegiatan dalam membangun sinergi diantara keduanya yang mengacu pada kondisi pengetahuan, keterampilan dan peningkatan sikap dan perilaku personil Babinsa maupun Bhabinkamtibmas pada sambang desa yang dapat diaktualisasikan dilapangan dengan indikasi adanya kemampuan kerja secara keseluruhan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Namun demikian, kondisi saat ini pendidikan dan pelatihan bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa belum optimal.

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam proses tersebut baik secara teknis maupun non teknis. Secara teknis, kondisi pendidikan dan pelatihan bersama tersebut terhambat dikarenakan adanya kesulitan dalam proses belajar yang diakibatkan oleh tingkat pemahaman akan pelajaran yang rendah seperti susahnya untuk berkonsentrasi mendengarkan

materi yang diajarkan maupun dalam memahami bacaan yang berakibat banyak personil yang tidak menyenangi materi tersebut. Adapun faktor non teknis muncul dalam diri personil seperti ketidaksukaan terhadap pengajar yang menyampaikan salah satu materi atau lingkungan belajar yang menurutnya tidak nyaman sehingga personil yang bersangkutan tidak menyenangi materi tersebut yang akhirnya tidak paham akan materi yang disampaikan. [11]

b. Pengembangan kemampuan dalam komunikasi sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengembangan kemampuan dalam komunikasi sosial guna meningkatkan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari kondisikemampuan berkomunikasi, kemampuan berintegrasi dan kemampuan beradaptasi serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan sikap seorang prajurit TNI dan personil Polri yang profesional. Disamping itu, pengembangan kemampuan tersebutmemiliki peranan sangat penting sebagai mediadalam menjalin komunikasi secara efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga terwujud suatu kesepahaman masyarakat sebagai bagian dari potensi nasional yang akan menjadi kekuatan nasional dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara.

Adapun kondisi pengembangan kemampuan komunikasi sosial tersebut dilakukan melalui kegiatan ceramah dan penjelasan teori tentang pengembangan kemampuan komunikasi sosial, peragaan dan praktek tentang tata cara serta teknik berkomunikasi. Dengan adanya pengembangan tersebut kondisikemampuan komunikasi sosial Babinsa maupun Bhabinkamtibmas akan memiliki kemampuan dalam penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan Pertahanan Negara dalam keadaan siap untuk dimobilisasi sewaktu-waktu dalam rangka memperkokoh Pertahanan Negara. Namun demikian, kondisi

pengembangan kemampuan komunikasi sosial saat ini belum optimal yang dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang memiliki keengganan untuk berpartisipasi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Hal tersebut terlihat dari kurang dekatnya hubungan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dengan komponen masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, kurang memahaminya struktur sosial maupun adat istiadat yang berlaku dan sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga berdampak adanya keengganan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara.

c. Kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui *assesment center* guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kondisi kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa melalui *assessment center* tidak terlepas dari kondisi saat ini yang belum memiliki standar penilaian yang lebih modern atau bahkan lebih menjurus kepada *like and dislike* atau suka tidak suka. *Assessment center* diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan dan pengembangan kemampuan, potensi maupun kompetensi dari setiap personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa *assessment center* adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *assessor*. Berkaitan dengan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa, *assessment center* tersebut berperan sebagai metode penilaian yang dapat meningkatkan kemampuan serta mengukur potensi secara terstandar yang dapat digunakan sebagai penilaian kemampuan sehingga diperoleh individu-individu yang memiliki

profil kompetensi sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa simulasi atau alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui *assessment center* berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang tercermin dalam kemampuan melakukan kerjasama yang terkoordinasi, dapat memecahkan masalah, meredam serta kemampuan berkomunikasi yang terarah guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kondisi pengembangan *assessment center* saat ini belum optimal terutama dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan teknik dan alat seleksi yang biasa dipergunakan dalam proses *assessment center*. [12]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan *assessment center* tersebut seperti belum adanya kesungguhan dari para peserta dalam pelaksanaan latihan berdasarkan situasi seperti dalam pelaksanaan grup diskusi tanpa pemimpin, berbagai jenis simulasi permainan manajemen, presentasi lisan, uji kepribadian dan kecerdasan, wawancara dan teknik lainnya seperti tugas pembuatan tulisan kreatif.

Piranti lunak yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa

Kondisi piranti lunak yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa difungsikan untuk menggerakkan organisasi yang mengatur tugas-tugas agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bias berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui piranti lunak tersebut didalamnya akan terurai cara kerja secara sistematis melalui tahap demi tahap yang efektif dan efisien dalam sistem komando,

koordinasi dan komunikasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambangdesa.

Restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dimaksudkan untuk melakukan penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Restrukturisasi tersebut dimaksudkan dalam menata kembali supaya tatanannya lebih baik yang dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman kerja yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara.

Adapun prinsip-prinsip dalam restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) antara lain mudah dimengerti dan tidak rumit, diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan SOP yang lainnya, keterukuran, efisien dan efektif, konsisten, berorientasi kepada pengguna, dinamis dan mengikat serta adanya kepatuhan dan kepastian hukum. Restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) tersebut memiliki peranan penting dihadapkan pada kompleksitas masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam keteladan, perlindungan, mampu mendengar serta mampu memfasilitasi masyarakat di kewilayahan sekaligus menjadi stakeholder yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa saat ini belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan personal yang datangnya dari individu organisasi baik TNI maupun Polri yang kurang mendukung adanya restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) saat ini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi diantaranya disebabkan

karena personel Polri maupun prajurit TNI yang bersangkutan belum paham secara benar tujuan dan manfaat bahkan beranggapan dengan adanya restrukturisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) justru mempersulit pekerjaan mereka.

- b. Membangun komunikasi secara terbuka guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Membangun komunikasi secara terbuka akan membentuk keterbukaan dalam bertukar ide dan tujuan pada semua tingkatan sehingga akan terbangun kepercayaan dan menciptakan perasaan memiliki yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Teuku May Rudy, komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan atau pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun nonverbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan untuk mencapai pengertian atau kesepakatan Bersama [14]. Berkaitan dengan sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa, membangun komunikasi secara terbuka dalam hal ini sebagai bagian dari proses dalam penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara.

Ada beberapa model dalam membangun komunikasi secara terbuka antara lain melalui komunikasi verbal, komunikasi non verbal atau isyarat, komunikasi tulisan dan komunikasi simbol. Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa dalam membangun komunikasi secara terbuka guna meningkatkan partisipasi masyarakat belum optimal. Ada beberapa faktor yang menghambat

dalam membangun komunikasi secara terbuka antara lain faktor sosiologis yang dapat mempengaruhi iklim sosial serta faktor psikologis. Faktor sosiologis berkaitan dengan pergaulan hidup yang bersifat pribadi dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam membangun komunikasi yang terbuka akan lebih mudah diterapkan pada masyarakat dengan cara pergaulan yang dinamis, rasional, dan bukan pribadi. Sedangkan faktor psikologi sering kali menjadi hambatan yang disebabkan si komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri sehingga akan sulit untuk berhasil apabila komunikasi sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati dan kondisi psikologis lainnya [14].

c. Mengembangkan pendekatan persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kondisi saat ini dalam mengembangkan pendekatan persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peranan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai leading sector di kewilayahan yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Ada beberapa strategi dalam mengembangkan pendekatan persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain kesan pertama, menarik empati, membangun kredibilitas dan memotivasi. Kesan pertama yang baik sangat penting dalam mengembangkan pendekatan persuasif, didalamnya akan terbangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ada beberapa kiat agar kesan pertama bisa meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain selalu melakukan evaluasi diri, tentukan kesan seperti apa yang diinginkan, selalu memperhatikan bahasa tubuh dan selalu perhatikan penampilan serta kuasai seni komunikasi. Sedangkan menarik empati

mengandung makna bahwa seorang Prajurit Babinsa dan Personel Bhabinkamtibmas pada sambang desa sebagai komunikator harus mau mendengarkan keluhan masyarakat sehingga akan mengetahui karakteristik, dan kebutuhan masyarakat. Membangun kredibilitas yang memiliki watak baik akan dipandang dan dinilai lebih positif oleh masyarakat sehingga akan menarik masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya.

Adapun memotivasi dalam mengembangkan pendekatan persuasif memiliki peranan penting dalam mendorong masyarakat meningkatkan partisipasinya seperti dengan memakai perangkat kerja yang tepat merupakan salah satu cara dalam memotivasi masyarakat pada sambang desa yang bias dilakukan. Namun demikian, implementasi dilapangan menunjukkan bahwa dalam mengembangkan pendekatan persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat saat ini belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi saat ini menunjukkan belum konsistensinya Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dalam menyebarkan informasi seperti kajian tentang Pertahanan Negara maupun bentuk kajian yang monoton serta tidak konsistennya jadwal kajian membuat masyarakat cepat bosan dalam mengikuti kajian bahkan sampai meninggalkan komunitas kajian tersebut.

Sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan kewilayahan

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan kewilayahan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen dalam melakukan penggerakan (*actuating*) dengan fungsi sarana prasarana sebagai penggerak dalam sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan kewilayahan antara lain :

- a. Kemitraan yang bersinergi dalam mengantisipasi kurangnya dukungan sarana prasarana pada sambang desa.

Kondisi kemitraan yang bersinergi dalam mengantisipasi kurangnya dukungan sarana prasarana pada sambang desa merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk diterapkan. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Berkaitan dengan kondisi kemitraan yang bersinergi pada sambang desa, kemitraan tersebut bukan sekedar sebuah kerjasama akan tetapi memiliki pola, nilai strategis sehingga terjalin kesepahaman dalam pengelolaan program, kesepahaman strategi pengembangan program antar lembaga yang bermitra guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kondisi kemitraan tersebut berupa kegiatan pengembangan program seperti tempat atau ruang pelatihan dan praktek, bahan belajar dan alat peraga dalam bentuk timbal balik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana lembaga lain ataupun sebaliknya. Disamping itu, kemitraan tersebut dapat dilakukan melalui transfer teknologi, transfer pengetahuan/keterampilan, transfer sumberdaya (manusia), transfer cara belajar (*learning exchange*), atau berbagai hal yang dapat diperbantukan sehingga terpadu guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kondisi kemitraan yang bersinergi dalam mengantisipasi kurangnya dukungan sarana prasarana pada sambang desa saat ini belum optimal. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi sikap dan daya juang personel yang bermitra saat ini menjadi kendala dikarenakan berada luar daerah sehingga mempengaruhi tekad serta daya juang yang kuat. Banyak personel merasa tidak betah karena berada di daerah terpencil

dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru terlebih dengan keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal.

- b. Mendayagunakan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pembinaan kewilayahan.

Mendayagunakan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pembinaan kewilayahan dilakukan melalui pengembangan pembinaan teritorial yang diarahkan untuk memperoleh suatu kekuatan kewilayahan, dimana unsur geografi dijadikan sebagai ruang juang, kondisi demografi dijadikan sebagai alat juang, dan kondisi sosial sebagai kondisi juang yang tangguh dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Berkaitan dengan sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa, kondisi dalam mendayagunakan sarana prasarana tersebut diselenggarakan melalui kegiatan penataan dan pembinaan. Penataan sarana prasarana merupakan kondisi kegiatan penyiapan hingga penetapan menjadi sarana prasarana meliputi pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi yang dapat mendukung pembinaan kewilayahan. Sedangkan pembinaan merupakan kondisi penting dalam peningkatan kompetensi, kualitas, kuantitas sarana prasarana yang digunakan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, mendayagunakan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pembinaan kewilayahan saat ini belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran sebagian personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana khususnya dalam pembinaan sarana prasarana saat ini sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan kewilayahan.

- c. Jalinan kerjasama (MoU) antara TNI-Polri serta instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kondisi jalinan kerjasama (MoU) antara TNI-Polri serta instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana tidak terlepas dari pentingnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara dihadapkan kepada kompleksitas ancaman yang terjadi saat ini. Jalinan kerja sama (MoU) antara TNI-Polri serta instansi terkait sangat penting untuk mendukung dalam mewujudkan sebuah sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dipahami oleh masyarakat secara efektif serta dapat diandalkan ditengah-tengah keterbatasan sarana prasarana sehingga dengan sendirinya masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Namun demikian, kondisi jalinan kerjasama (MOU) antara TNI-Polri serta instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana saat ini belum optimal. [15]

Hal tersebut terlihat pada lemahnya koordinasi antar instansi terkait sehingga belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan masyarakat kurang kooperatif dalam menunjukkan partisipasinya selama ini. Disamping itu, masih adanya sikap ego sektoral antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas maupun instansi terkait pada sambang desa yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi terkait sehingga mempersulit dalam mengembangkan jalinan kerjasama (MOU) tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya memberikan gambaran mengenai sinergi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa yang bertujuan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan Negara. Hal tersebut menjadi wujud nyata sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat masih dapat ditingkatkan. Merujuk pada belum efektifnya sistem informasi manajemen yang diterapkan pada Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Kondisi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dalam sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dilakukan dengan mengembangkan langkah-langkah melalui pengembangan komunitas masyarakat dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Disamping itu, dapat diambil langkah-langkah dalam membangun kemitraan dalam meningkatkan kualitas layanan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan pola asuh yang dibangun atas dasar pengasuhan yang dilakukan oleh Lembaga maupun Kementerian terkait serta membuat jalinan kerjasama (MoU) antara TNI-Polri dan instansi terkait dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen maupun dengan melakukan langkah-langkah restrukturisasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa dapat terus dioptimalisasi dengan memperhatikan: 1) Kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara Kondisi kemampuan SDM Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang tidak terlepas dari langkah-langkah dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa

guna meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara terprogram dalam peningkatan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang terencana di masing-masing lembaga pendidikan TNI-Polri. Disamping itu, diperlukan pengembangan kemampuan dalam komunikasi sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sambang atau *Door to Door System* (DDS) dalam upaya mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan Kamtibmas. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui *assessment center* sangat diperlukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat; 2) Belum optimalnya sistem dan metode (piranti lunak) sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Kondisi piranti lunak yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada sambang desa pada saat ini dijadikan sebagai pedoman dilapangan memiliki peranan penting sehingga diperlukan langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan piranti lunak. Adapun langkah-langkah dalam mewujudkan restrukturisasi *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tugas-tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas diperlukan sebagai upaya dalam menata kembali supaya tatanannya lebih baik yang dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman kerja. Adapun dalam membangun komunikasi secara terbuka guna meningkatkan partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun keterbukaan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam

mengembangkan pendekatan persuasif guna meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan sebagai upaya agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasinya; dan 3) Belum optimalnya sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kewilayahan bidang geografi, demografi dan kondisi sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Dengan demikian, perlu langkah-langkah untuk membangun kemitraan yang bersinergi dalam mengantisipasi kurangnya dukungan sarana prasarana untuk mendukung pembinaan kewilayahan melalui kegiatan pengembangan program dengan memanfaatkan sarana dan prasarana lembaga lain ataupun sebaliknya. Disamping itu diperlukan upaya-upaya dalam mendayagunakan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pembinaan kewilayahan serta perlunya dalam mengembangkan jalinan kerjasama (MoU) antara TNI-Polri serta instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- [2] Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., Mudhio, I. W., & Mulyadi, Lukman Yudho Prakoso, I. W. M. (2021). KONFRONTASI MILITER PEMBEBASAN PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265–276. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.635>
- [3] Prakoso, L. Y. (2021). Defense Public Policy in the Handling People Smuggling

- in Batam Waters, Indonesia. *DEGRES*, 20(2), 167–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.1877/degres.v20i2.82><https://doi.org/https://doi.org/10.1877/degres.v20i2.82>
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- [5] Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- [6] Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [7] B Miles, Matthew dan Huberman, Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit UI: Jakarta
- [8] Haynes, S. N., Richard, D. C., & Kubany, E. S. (1995). *Content Validity in Psychological Assessment: A Functional Approach to Concepts and Methods*.
- [9] Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatnodkk. Jogjakarta: Pustaka.
- [10] Hasibuan, Malayu S.P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT BumiAksara.
- [11] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *ITALIENISCH*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>
- [12] Risahdi, M., Jaddawi, M., Henny, A., Prakoso, L. Y., Martani, W. R., Muhammad Risahdi, Murtir Jaddawi, Mansyur ., Andi Henny, Lukman Yudho Prakoso, & Wuri Retno Martani. (2020). Ambiguous Policy on Securing the Vital Objects of The Indonesian Armed Forces in East Java. *Public Policy and Administration Research*, 10(1), 52–56. <https://doi.org/10.7176/ppar/10-1-08>
- [13] Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). AN ANALYSIS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT: INDONESIA'S PERSPECTIVES, CONTEXTS AND RECOMMENDATIONS. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- [14] Arief, R., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). UNDERSTANDING NATIONAL IDENTITY TO CREATE LOVE AND PROUD OF BEING A PART OF THE INDONESIAN NATION. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549–2556. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.518>
- [15] Nizar, A. A., Pramono, B., Gunawan, R., & Prakoso, L. Y. (2021). Handling Social Conflicts in The Context of A Military Campaign Strategy (Study in The Working Area of The Balik Papan Police Resort). *International Journal of Social Science And Human Research*, 04(05), 1205–1209. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-40>